BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : FI.26-30/Kol.60-8/49
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Tindaklanjut pengawasan dan pengendalian

Jakarta, 16 Desember 2015

Kepada
Yth. Bupati Bantul
di
BANTUL

1. Bersama ini kami informasikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf d Undang-undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang mendapat delegasi wewenang dari Presiden yaitu berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan Manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria Manajemen ASN.
2. Atas kewenangan tersebut pada tanggal 9 s.d. 11 Desember 2015 kami melaksanakan pengawasan dan pengendalian (wasdal) bidang kepegawaian terhadap netralitas PNS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2015 yang berada di Instansi vertikal maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dilingkungan Provinsi D.I. Yogyakarta pada Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) D.I. Yogyakarta, berdasarkan informasi dan dokumen hasil temuan dan kajian Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bantul terhadap dugaan pelanggaran dimaksud, ternyata diketemukan fakta dan keterangan adanya 15 (lima belas) orang PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang melakukan pelanggaran, dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung salah satu pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

   Adapun 15 (lima belas) orang PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dimaksud, adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	TEMUAN/KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN DARI PANWAS
1	Sunarto, SH, MM	Asisten Administrasi Umum	No. 004/TM/PANWASKAB-BTL/VIII/2015 Tgl. 22 Agustus 2015 No. 001/TM/PANWASCAM-PLT/VIII/2015 Tgl. 2 September 2015
2	Bambang Purwadi Nugroho, SH, MH	Kepala Inspektorat	No. 003/TM/PANWASKAB-BTL/VIII/2015 Tgl. 14 Agustus 2015
3	Drs. Riyantono, M.Si	Sekretaris Daerah	No. 004/TM/PANWASKAB-BTL/VIII/2015 Tgl. 24 Agustus 2015

4	Drs. Supriyanto, MM	Kepala BKD	No. 003/TM/PANWASKAB-BTL/VIII/2015 Tgl. 14 Agustus 2015 No. 004/TM/PANWASKAB-BTL/VIII/2015 Tgl. 22 Agustus 2015
5	Drs. Masharun, MM	Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal	No. 004/TM/PANWASKAB-BTL/VIII/2015 Tgl. 22 Agustus 2015
6	Ir. Edy Machmud	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	No. 004/TM/PANWASKAB-BTL/VIII/2015 Tgl. 22 Agustus 2015
7	Partogi Dame Pakpahan, BE, SE, M.Si	Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan	No. 004/TM/PANWASKAB-BTL/VIII/2015 Tgl. 22 Agustus 2015
8	Drs. Supriyanto Widodo, MT	Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga	No. 004/TM/PANWASKAB-BTL/VIII/2015 Tgl. 22 Agustus 2015
9	Drs. Totok Sudarto, M.Pd	Kepala Dinas Pendidikan Dasar	No. 004/TM/PANWASKAB-BTL/VIII/2015 Tgl. 22 Agustus 2015
10	Slamet Santoso, S.IP	Kepala Kantor Pengelolaan Pasar	No. 004/TM/PANWASKAB-BTL/VIII/2015 Tgl. 22 Agustus 2015
11	Sigit Widodo	Kabag Organisasi Kabupaten Bantul	No. 004/TM/PANWASKAB-BTL/VIII/2015 Tgl. 22 Agustus 2015
12	Drs. Danang Erwanto	Kepala Bagian Tapem Kabupaten Bantul	No. 004/TM/PANWASKAB-BTL/VIII/2015 Tgl. 22 Agustus 2015
13	Drs. Fatoni	Camat Sanden	No. 004/TM/PANWASKAB-BTL/VIII/2015 Tgl. 22 Agustus 2015
14	R. Jati Bayubroto, SH, M.Hum	Camat Banguntapan	No. 004/TM/PANWASKAB-BTL/VIII/2015 Tgl. 22 Agustus 2015
15	Dr. I Wayan Sudana, M.Kes	Kepala RSUD Panembahan Senopati	No. 004/TM/PANWASKAB-BTL/VIII/2015 Tgl. 22 Agustus 2015

3. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon perhatian Saudara untuk menindaklanjuti PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (15) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dan hasilnya agar disampaikan kepada kami dalam waktu yang tidak terlalu lama.
4. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A.n. Kepala Badan Kepegawaian Negara
Plt. Direktur Wasdal Bidang Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat,

Drs. Paulus Dwi Laksono H., M.AP.
NIP. 19671110 199303 1 001

Tembusan :
1. Kepala BKN, Cq. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian, sebagai laporan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI di Jakarta;
4. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
5. Gubernur D.I. Yogyakarta di Yogyakarta;
6. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) D.I. Yogyakarta di di Yogyakarta;
7. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bantul di Bantul.